

HISTORIOGRAFI UNDANG - UNDANG PENDIDIKAN DI INDONESIA

Sejak Zaman Kolonial Hingga
Zaman Reformasi



Tim Penulis:

Usman | Farid Fauzi | Rejeki Lensa | Emy Yurdiana
Aini Safitri | Ida Nusraini | Nurmalina | Rasidah | Wirda Novita
Raudatussaadah | Farida Isnaini | Ifnaldi | Irwansyah
Muhammad Jufni | Muhammad Yusuf
Didi Sartika | Windisyah Putra

HISTORIOGRAFI UNDANG – UNDANG PENDIDIKAN DI INDONESIA

Sejak Zaman Kolonial Hingga Zaman Reformasi

Usman

Farid Fauzi

Rejeki Lensa

Emy Yurdiana

Aini Safitri

Ida Nusraini

Nurmalina

Rasidah

Wirda Novita

Raudatussaadah

Farida Isnaini

Ifnaldi

Irwansyah

Muhammad Jufni

Muhammad Yusuf

Didi Sartika

Windisyah Putra



HISTORIOGRAFI UNDANG – UNDANG PENDIDIKAN DI INDONESIA

Sejak Zaman Kolonial Hingga Zaman Reformasi

Tim Penulis:

Usman
Farid Fauzi
Rejeki Lensa
Emy Yurdiana
Aini Safitri
Ida Nusraini
Nurmalina
Rasidah
Wirda Novita
Raudatussaadah
Farida Isnaini
Ifnaldi
Irwansyah
Muhammad Jufni
Muhammad Yusuf
Didi Sartika
Windisyah Putra

Editor : Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : vi, 97
ISBN : 978-623-8385-65-2
Terbit Pada : Mei 2024
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan perjalanan yang menyelidiki dan menganalisis bagaimana undang-undang pendidikan Indonesia berkembang sepanjang sejarahnya, dari masa penjajahan kolonial hingga era reformasi, yang membawa perubahan besar dalam tatanan politik, sosial, dan pendidikan Indonesia. Buku ini akan membimbing para pembaca melalui sejarah undang-undang dan kebijakan pendidikan Indonesia, dimulai dari masa penjajahan Belanda, ketika pendidikan diatur untuk memenuhi kepentingan kolonial hingga transformasi pendidikan setelah kemerdekaan. Selain itu, kami akan membahas periode pemerintahan Orde Baru, yang ditandai dengan kebijakan pendidikan yang terpusat dan otoriter serta konsekuensi dari reformasi politik yang terjadi pada undang-undang pendidikan. Perubahan ini akan mencakup perubahan paradigma pendidikan, otonomi daerah, dan upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.

Buku ini tidak hanya memberikan gambaran tentang perkembangan undang-undang dan kebijakan pendidikan di Indonesia tetapi juga menunjukkan peran tokoh-tokoh pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembentukannya. Tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara dan Mohammad Hatta sangat mendukung hak pendidikan setiap warga negara Indonesia. Lebih dari sekadar menceritakan sejarah, buku ini juga menawarkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana undang-undang pendidikan mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Dengan menggabungkan pendekatan historis dan analisis kebijakan, kita dapat melihat bagaimana undang-undang pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Selain itu, buku ini memberikan perhatian khusus pada kesulitan dan peluang yang dihadapi saat menerapkan undang-undang pendidikan di lapangan. Penelitian ini memberikan wawasan yang

bermanfaat bagi pembuat kebijakan, praktisi pendidikan, dan semua orang yang peduli dengan masa depan pendidikan di Indonesia dengan menekankan perbedaan antara kebijakan dan praktik serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan undang-undang pendidikan.

Buku ini diharapkan dapat membantu kita memahami perkembangan sistem pendidikan Indonesia dan menjawab tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua anak di negara ini dengan menyajikan sejarah undang-undang pendidikan di Indonesia. Semoga perjalanan intelektual dari buku ini menyenangkan dan semoga buku ini memberi banyak pelajaran hidup bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Mei 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 HAK ASASI MANUSIA DALAM PENDIDIKAN	1
Hakikat Hak Asasi Manusia	1
Definisi Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan	2
Peraturan Perundang-undangan Atas Hak untuk Memperoleh Pendidikan (Khususnya Pendidikan Dasar)	5
Penegakan HAM Di Lingkungan Pendidikan	7
Realisasi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Di Indonesia	8
BAB 2 FUNDAMENTAL YURIDIS DALAM SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA.....	10
Pengertian Sistem Pendidikan Nasional.....	10
Dasar-dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional.....	11
Pendidikan Menurut Peraturan Perundang- Undangan	12
Pendidikan Menurut Peraturan Pemerintah	17
BAB 3 UNDANG - UNDANG PENDIDIKAN ZAMAN KOLONIAL.....	21
Pendidikan Zaman Kolonial	21
Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda pada Masa Politik Etis.....	25
BAB 4 UNDANG - UNDANG PENDIDIKAN ZAMAN REVOLUSI.....	28
Situasi Pendidikan Saat Revolusi Kemerdekaan.....	28
Landasan Idiil.....	30
Tujuan Pendidikan	31
Susunan Persekolahan dan Kurikulum	32

Usaha Pemerintah dalam Mengembangkan Pendidikan Pada Masa Revolusi Kemerdekaan.....	39
BAB 5 UNDANG - UNDANG PENDIDIKAN ZAMAN ORDE LAMA...44	
Sistem Pendidikan Indonesia Masa Orde Lama	44
Undang-undang Pendidikan Pada Periode Orde Lama.....	45
BAB 6 UNDANG – UNDANG PENDIDIKAN ZAMAN ORDE BARU ..56	
Sistem Pendidikan Pada Zaman Orde Baru.....	56
Kurikulum Pada Masa Orde Baru.....	58
BAB 7 UNDANG - UNDANG PENDIDIKAN ZAMAN REFORMASI ...61	
Fokus Utama Pendidikan Pada Zaman Reformasi	61
Karakteristik Kurikulum Pada Zaman Reformasi	62
BAB 8 TANTANGAN PENDIDIKAN INDONESIA PADA ERA DIGITAL	
.....	65
Problematika Transformasi Pendidikan Menuju Era 5.0	65
Sistem Pendidikan Di Era 5.0	67
Pengajaran Di Era Digital 5.0.....	68
BAB 9 PENDIDIKAN INDONESIA DALAM KONTEKS	
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....70	
Apa itu Pembangunan Berkelanjutan?	70
Pendidikan Indonesia Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan	
.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....77	
PROFIL PENULIS.....85	

BAB 1

HAK ASASI MANUSIA DALAM PENDIDIKAN

Hakikat Hak Asasi Manusia

Sejak tahun 1948, sejumlah besar dan beragam pekerjaan telah – dan sedang – dilakukan untuk kepentingan pendidikan hak asasi manusia. Adanya banyak cara untuk melakukan pendidikan HAM memang seharusnya terjadi karena setiap individu memandang dunia secara berbeda, para pendidik bekerja dalam situasi yang berbeda, dan organisasi serta badan publik yang berbeda mempunyai keprihatinan yang berbeda pula; jadi, meskipun prinsipnya sama, praktiknya mungkin berbeda. Mengkaji peran dan kepentingan dari berbagai "individu dan organ masyarakat" dan bagaimana hal ini mempengaruhi fokus dan cakupan keterlibatan mereka dalam Pendidikan Hak Asasi Manusia akan membantu memberikan pemahaman tentang keragaman pengajaran dan kegiatan yang ditawarkan.

Pendidikan hak asasi manusia dianggap "penting untuk mempromosikan dan mencapai hubungan yang stabil dan harmonis di antara masyarakat dan untuk membina saling pengertian, toleransi, dan perdamaian" oleh Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1993. Majelis Umum PBB menyerukan untuk mempromosikan "pelatihan dan informasi diseminasi yang bertujuan untuk membangun budaya universal hak-hak asasi manusia" pada tahun 1994, dan menetapkan Dekade Pendidikan Hak-hak Asasi Manusia PBB (1995-2004). Oleh karena itu, pemerintah bekerja lebih keras untuk memajukan pendidikan hak-hak asasi manusia,

yang beragam adalah dengan mengadopsi kebiasaan dan perilaku baru. Cara penyelenggaraan pendidikan juga harus berubah untuk memenuhi kebutuhan. Dalam artian, pendidikan harus relevan dengan situasi masyarakat. Artinya pendidikan yang diselenggarakan mampu menghasilkan lulusan terbaik yang dapat berkiprah dalam masyarakat.

Realisasi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Di Indonesia

Menurut Faradila (2013: 71), UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara teori, juga menjunjung tinggi gagasan untuk memberikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan dasar gratis dan wajib belajar. Berikut ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap pendidikan dasar:

1. Dedikasi untuk menawarkan fasilitas dan layanan, serta menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas tinggi bagi semua individu.
2. Memastikan ketersediaan dana untuk menyelenggarakan pendidikan yang diperlukan bagi semua orang yang berusia 7 hingga 15 tahun.
3. Memastikan bahwa wajib belajar sekolah dasar dapat diberikan tanpa biaya.
4. Satuan pendidikan wajib menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan yang dibutuhkan untuk menjamin kualitas pendidikan.
5. Diperlukan adanya pengarahan dan pengembangan profesional bagi para pendidik yang bekerja di organisasi pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Dedikasi untuk membantu kepemimpinan dan pertumbuhan profesional para guru di satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31, Ayat 4, harus menjadi dasar bagi pendanaan yang dialokasikan untuk pendidikan.
8. Dedikasi untuk menetapkan standar nasional dan peraturan untuk pendidikan dalam rangka menjamin kualitas pendidikan nasional.

9. Tugas untuk mengatur pembentukan program pendidikan, pelatihan pendidik, dan akuisisi fasilitas kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan menengah.
10. Satuan pendidikan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan keunggulan daerah dan standar pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan tugas-tugas tersebut di atas, negara harus memastikan bahwa anak-anak usia sekolah menerima pendidikan dasar gratis dan menyelesaikan pendidikan wajib mereka.

BAB 2

FUNDAMENTAL YURIDIS

DALAM SISTEM PENDIDIKAN

INDONESIA

Pengertian Sistem Pendidikan Nasional

Pertama-tama kita harus mendefinisikan istilah "sistem" dan "pendidikan nasional" sebelum kita dapat memahami arti penting sistem pendidikan nasional. Sebuah "sistem" didefinisikan sebagai satu kesatuan komponen yang saling berhubungan yang bekerja bersama dan dengan satu sama lain untuk menghasilkan suatu hasil yang diterapkan sebaik mungkin sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam arti luas, istilah "sistem" dapat digunakan untuk merujuk pada suatu kesatuan yang terdiri dari sumber-sumber yang memiliki hubungan fungsional yang teratur, bukan acak, dan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, seperti yang dinyatakan oleh Sanjaya (2007). Sistem juga dapat dipahami sebagai kumpulan dari komponen atau elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan (Ikhsan, 2005).

Namun, pengertian pendidikan nasional didefinisikan sebagai pengajaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu dan dijiwai oleh falsafah hidup bangsa, dengan tujuan akhir untuk memajukan tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 memuat hal-hal berikut. Mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1, Ayat 2 lebih lanjut mendefinisikan pendidikan nasional sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang

tanggap terhadap tuntutan perkembangan zaman dan berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari beberapa penjelasan di atas bahwa istilah "sistem pendidikan nasional" merujuk pada kumpulan elemen pendidikan yang saling berkolaborasi, berkorelasi, serta bekerja sama. Unsur-unsur pendidikan tersebut saling berinteraksi, berkorelasi, serta bekerja sama secara terpadu dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan peraturan perundang-undangan.

Dasar-dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional

Istilah "dasar" mengacu pada dasar yang berfungsi sebagai panduan dan pijakan saat melakukan tugas tertentu. Di sisi lain, kata "yuridis" biasanya didahului dengan istilah secara hukum atau kesulitan hukum. Hukum yang dimaksud dalam hal ini biasanya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kumpulan asas dan aturan hukum yang mengatur sistem pendidikan nasional berfungsi sebagai landasan yuridis. Pada saat ini, sistem pendidikan nasional di negara ini diselenggarakan sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasannya.

Bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pendidikan nasional, landasan hukum ini berfungsi sebagai norma. Hal ini mengandung makna bahwa setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional harus menyadari dan mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. Agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, baik peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan, terlindungi hak dan kewajibannya dengan adanya landasan hukum sistem pendidikan nasional. Selain itu, hal ini dapat membantu pemerintah dalam upayanya untuk mempromosikan pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas dan kemajuan kerangka kerja pendidikan negara.

UUD 1945, UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), beberapa Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan

Penerapan prinsip-prinsip yuridis ini dalam sistem pendidikan Indonesia menjadi landasan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas, serta untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan zaman.

BAB 3

UNDANG - UNDANG

PENDIDIKAN ZAMAN

KOLONIAL

Pendidikan Zaman Kolonial

Pendidikan memiliki suatu keunikan, di satu sisi merupakan bagian kebudayaan, namun disisi lain merupakan bentuk proses pembudayaan (*enculturation*) yang sifatnya spesifik, berbeda antara satu masyarakat dengan yang lainnya. Apapun bentuk pendidikan seperti yang dimaksud Collins (1977), pendidikan keterampilan praktis, pendidikan untuk keanggotaan kelompok status, dan pendidikan birokrasi, satu hal yang selalu perlu ditonjolkan dalam memaknai sejarah perkembangan pendidikan, pernyataan tersebut mengajak kepada kita untuk mengedepankan kekuatan-kekuatan pendidikan, di samping untuk melibatkan akademisi sejarah pendidikan yang lebih berbasis disiplin ilmu (*disciplined-based field*). Terutama untuk lebih mengokohkan kaitan sejarah pendidikan progresif dengan sejarah sosial dan intelektual. Sebagaimana dijelaskan oleh Apple dalam bukunya *Education and Power*, (1982), pendidikan itu tidak sekedar memiliki kekuasaan (*power*) intelektual transmitif, tetapi juga kekuasaan intelektual transformatif.

Sebagai kekuatan intelektual transformatif, yaitu intelektual yang memandang belajar dan mengajar sebagai aktivitas politik, yang membangkitkan kesadaran peserta didik untuk dapat mengungkap penindasan dan ketimpangan asimetris antara berbagai kelompok dalam mewujudkan sistem demokrasi yang partisipatoris. Sebagai kekuatan intelektual yang bersifat transmisif, merujuk pada upaya

setempat dan menawarkan pendidikan selama tiga tahun (Brugmans, 1987: 179).

P Melibatkan masyarakat desa merupakan salah satu kriteria dan syarat khusus untuk mendirikan sekolah desa. Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sekolah desa dapat didirikan: 1) pemerintah hanya akan membantu fasilitas belajar; 2) pembangunan sekolah harus melalui masa uji coba; dan 3) tidak diperkenankan memaksa siswa untuk bersekolah (Nurhusna, 2020: 27). Akses masyarakat adat terhadap pendidikan dipengaruhi oleh semakin banyaknya sekolah desa yang didirikan sebagai hasil dari keterlibatan masyarakat dalam pendirian lembaga-lembaga tersebut, baik secara mandiri maupun kolektif. Pendirian sekolah desa yang semakin tumbuh di wilayah-wilayah kolonisasi dan penduduk asli tidak serta merta membuat animo masyarakat juga tinggi. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat belum begitu tertarik dengan sekolah umum, mengingat masyarakat pribumi merupakan masyarakat agraris dan lebih cenderung untuk memberikan pendidikan agama.

BAB 4

UNDANG - UNDANG

PENDIDIKAN ZAMAN

REVOLUSI

Situasi Pendidikan Saat Revolusi Kemerdekaan

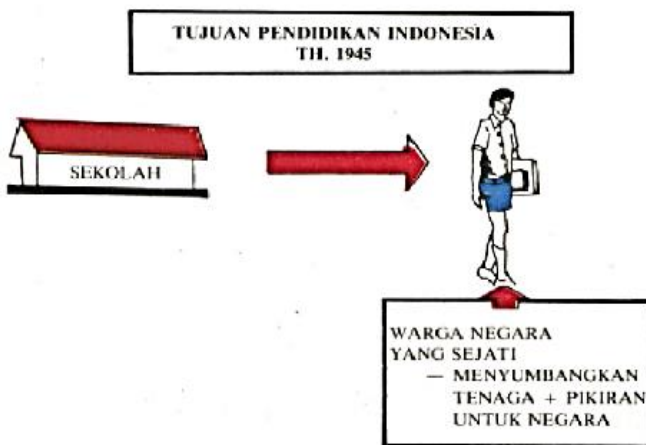
Pelaksanaan pendidikan pada masa revolusi kemerdekaan dipengaruhi oleh situasi politik yang tidak baik pada waktu itu. Kondisi politik tersebut berpengaruh langsung terhadap situasi pendidikan maupun perubahan sistem pendidikan dari masa sebelumnya. Adapun sistem persekolahan yang mengalami perubahan tersebut meliputi landasan idiil, tujuan pendidikan, susunan persekolahan dan kurikulum. Untuk memperjelas mengenai situasi pendidikan pada masa revolusi kemerdekaan dan sistem pendidikannya akan dibahas pada bab berikut.

Keprihatinan pemerintah terhadap pendidikan mulai dirasakan setelah kemerdekaan, maka pada tanggal 1 Maret 1946, menteri Suwandi dengan keputusan No. 104/Bhg-0/ 1946 telah membentuk suatu Panitia Penyelidik Pengajaran yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan sekretarisnya Soegarda Purbakawatja bermaksud untuk mengatur sekolah-sekolah. Panitia itu selanjutnya menyelenggarakan pertemuan dan rapat-rapat yang akhirnya telah menghasilkan Pengaturan Pendidikan dan Pengajaran mulai dari sekolah taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, dari pendidikan untuk anak desa sampai kota dan pendidikan umum kejuruan. Di samping itu telah dipikirkan tentang usaha kewajiban belajar sebagai usaha menanggulangi banyaknya buta huruf

selekas mungkin mengusahakan agar pembaharuan pendidikan dan pengajaran dijalankan sesuai dengan rencana pokok-pokok usaha dan pengajaran baru.

Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan pada waktu itu dirumuskan untuk mendidik warga negara yang sejati, sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa tersebut penekannya pada penanaman semangat patriotisme. Penanaman semangat patriotisme sebagai tujuan pendidikan memang sesuai dengan situasi pada waktu itu. Negara dan bangsa Indonesia sedang mengalami perjuangan fisik, dan sewaktu-waktu pemerintah kolonialis Belanda masih berusaha untuk menjajah kembali negara Indonesia. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa semangat patriotisme sangat ditekankan oleh pemerintah sebagai tujuan nasional pendidikan di Indonesia. Maka dengan semangat itu, kemerdekaan dapat dipertahankan dan diisi.



Gambar 4.1: Tujuan Pendidikan Pada Tahun 1945

Sumber: diolah penulis

Pada bulan Desember 1949, Republik Indonesia mengalami perubahan ketatanegaraan. Undang-undang Dasar 1945 diganti

- b. Menggunakan perumahan-perumahan rakyat atau swasta yang memadai untuk dijadikan bangunan sekolah. Tindakan ini sebagai usaha kedua pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gedung sekolah.
- c. Menyelenggarakan sistem mengajar dua kali sehari yang berarti bahwa satu bangunan sekolah dipergunakan oleh dua sekolah, sekolah pagi dan sore. Dalam periode ini, muncul usaha-usaha masyarakat yang sangat terpuji. Mereka bergotong-royong membangun gedung sekolah beserta peralatannya yang kemudian disumbangkan kepada pemerintah. Usaha ini makin nampak hasilnya, setelah di kalangan masyarakat timbul organisasi Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) yang berhasil menghimpun kekuatan anggotanya untuk membantu dalam bidang pendidikan. Sampai akhir tahun 1954 rakyat di seluruh Indonesia telah menyumbangkan sebanyak 6.878 gedung sekolah beserta tanahnya kepada pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setelah kemerdekaan, jumlah gedung sekolah di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Bertambahnya jumlah gedung sekolah tersebut merupakan bukti bahwa kesempatan belajar sungguh terbuka bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia.

BAB 5

UNDANG - UNDANG

PENDIDIKAN ZAMAN ORDE

LAMA

Sistem Pendidikan Indonesia Masa Orde Lama

Setelah Soekarno menetapkan Pancasila sebagai landasan utama negara Indonesia pada 1 Juni 1945, ketentuan yuridis Konstitusi ini dibuat menjadi konstruksi hukum yang memiliki konsekuensi formal, fungsional, dan tidak formal. Pancasila digunakan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di negara republik Indonesia. Ideologi bangsa Indonesia dan negara adalah Pancasila.

Pancasila adalah identitas dan karakteristik bangsa atau kepribadian nasional yang diwujudkan dalam sistem pancasila yang menjiwai setiap kepribadian bangsa, pandangan hidup (keyakinan bangsa), sistem kenegaraan, dan masyarakat Indonesia (Zulkarnain, 2017: 61). Konsep dan visi pendidikan saat ini Orde lama seharusnya dapat menentukan tujuan pendidikan yang jelas. Oleh karena itu, tujuan pendidikan yang jelas akan mengarah pada metode pembelajaran yang efektif dan pencapaian kompetensi yang dibutuhkan. Pada akhirnya, pendidikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan kemajuan negara.

Pendidikan nasionalisme dan pembelaan tanah air menjadi fokus utama di sekolah pada awal kemerdekaan (Tim UNY: 76). Nasionalisasi dan ideologisasi saat ini menjadi fokus utama pendidikan. Penekanan pada kedua bidang tersebut berasal dari periode penting setelah kemerdekaan, ketika banyak konflik yang

Pendidikan dikembangkan dengan sistem among yang disebut Panca Dharma Taman Siswa dan semboyan *ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani* di bawah menteri pendidikan Ki Hajar Dewantara.

Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Perundang-undangan pendidikan nasional pertama kali dibuat pada tahun 1950, UU No. 4/1950, yang disempurnakan (jo) menjadi UU No. 12/1954 tentang dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada tahun 1961, UU No. 22/1961 tentang Pendidikan Tinggi, UU No. 14/1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional, dan UU No. 19/1965 tentang pokok sistem pendidikan nasional pancasila dibuat lagi. 90 persen orang Indonesia berpendidikan SD setelah Presiden Soekarno meninggal (Tim UNY, tanpa tahun: 92). Oleh karena itu, kondisi politik Indonesia pada masa orde lama sangat memengaruhi sistem pendidikan. Dengan semangat kebangsaan tengah, Indonesia terus belajar bagaimana membangun negara dan berdemokrasi setelah keluar dari penjajahan dan mempertahankan kemerdekaannya dengan perjanjian KMB. Dalam menjalankan pemerintahan Indonesia, kejadian euforia sering terjadi. Kesalahan-kesalahan itu terbukti dari kestabilan pemerintahan dan sistem parlemennya pada saat itu. Sulit bagi parlemen untuk bekerja sama dengan baik, positif, maju, dan progresif untuk menciptakan dan menerapkan pendidikan nasional yang kuat dan efektif karena banyak partai yang bersaing untuk kekuasaan. Sampai akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang meminta parlemen dibubarkan dan kembali ke UUD 1945. Sebaliknya, UUDS 1950, yang memiliki fungsi untuk menstabilkan keadaan politik nasional saat itu.

BAB 6

UNDANG – UNDANG

PENDIDIKAN ZAMAN ORDE

BARU

Sistem Pendidikan Pada Zaman Orde Baru

Sesudah PKI berhasil ditumpaskan, pemerintahan Orde Baru yang dikepalai oleh Presiden Soeharto terus mengadakan pembaruan serta pembangunan di seluruh bidang termasuk pendidikan. Ketetapan MPRS Nomor: XXVII/Tap/MPRS/1966 yang berisi tujuan pendidikan merupakan untuk melahirkan manusia Pancasila sejati bersumber pada ketentuan-ketentuan yang dikehendaki dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, sehingga dipikirkan usaha-usaha pembaharuan pendidikan. Semenjak tahun 1959, Indonesia terletak di dasar gelora manipol (manifesto Politik) USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, serta Karakter Indonesia). Manipol-USdek sebagai “dewa” dalam kehidupan politik serta seluruh bidang kehidupan termasuk di dalam bidang pendidikan. Keputusan Presiden Nomor 145 tahun 1965, tujuan nasional pendidikan era Orde Lama cocok dengan manipol-USDEK. Tujuan pendidikan yang diterapkan ialah Panca Wardana (5 pokok perkembangan). Tujuan pendidikan ini tidak berlangsung lama serta ditinggalkan sesudah meletusnya kejadian Gram 30/S/PKI pada tahun 1965 (Abdullah, 2011).

Masyarakat mulai sadar bahwa terdapat maksud politik PKI yang tercantum dalam tujuan pendidikan tersebut dengan menggunakan Pancasila selaku tamengnya. Dikeluarkannya ketetapan MPRS Nomor: XXVII tahun 1966 menghapus Keputusan Presiden No 145 tahun 1965

satuan pelajaran dirinci jadi: tujuan instruksional universal (TIU), tujuan instruksional khusus(TIK), materi pelajaran, perlengkapan pelajaran, aktivitas belajar- mengajar, serta penilaian. Pada kurikulum ini kedudukan guru jadi lebih berarti, sebab setiap guru harus untuk membuat Secara rinci tujuan yang ingin dicapai sepanjang proses belajar-mengajar berlangsung. Masing-masing guru wajib perinci dalam perencanaan penerapan program belajar mengajar. Tiap tatap muka sudah diatur serta dijadwalkan sedari awal. Dengan kurikulum ini seluruh proses belajar mengajar jadi sistematis dan bertahap (<https://attriolong.com>).

3. Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 mengusung“ *process skill approach*”. Proses jadi lebih berarti dalam penerapan pendidikan. Kedudukan siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati suatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga memberi tahu. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif(CBSA) ataupun *Student Active Learning* (SAL). CBSA memposisikan guru selaku fasilitator, sehingga wujud aktivitas ceramah tidak lagi ditemui dalam kurikulum ini. Pada kurikulum ini siswa diposisikan selaku subjek dalam proses belajar mengajar. Siswa pula diperankan dalam pembuatan suatu pengetahuan dengan diberi peluang untuk mengemukakan komentar, bertanya, serta mendiskusikan sesuatu.

4. Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 adalah hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum tadinya, paling utama kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini wujud operasi kepada siswa mulai terjalin dengan beratnya beban belajar siswa, dari muatan nasional hingga muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keahlian daerah, dan lain- lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat pula menekan supaya isu- isu tertentu masuk dalam kurikulum. Kesimpulannya, Kurikulum 1994 menjelma jadi kurikulum luar biasa padat. banyaknya beban belajar siswa yang wajib mereka tuntaskan, serta mereka tidak mempunyai opsi untuk menerima ataupun menolak terhadap banyaknya beban belajar itu

BAB 7

UNDANG - UNDANG

PENDIDIKAN ZAMAN

REFORMASI

Fokus Utama Pendidikan Pada Zaman Reformasi

Fokus utama pendidikan nasional ketika Indonesia lepas dari penjajahan yaitu mencerdaskan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan bangsa. Tujuan sebenarnya dari pendidikan zaman kemerdekaan adalah untuk mengisi tata kehidupan dan pembangunan. Tujuan tersebut mengalami kendala, yaitu penjajah Belanda ingin menjajah kembali sehingga memaksa kita kembali berjuang secara politik dan fisik serta adanya kendala dari dalam yaitu pergolakan politik.

Pendidikan pada masa kemerdekaan walaupun dalam keadaan sulit tetapi tetap mampu menghasilkan produk hukum tentang pendidikan, yaitu Undang-undang pendidikan Nomor 4 tahun 1950. Itulah produk hukum pendidikan Nasional pertama terlepas kemudian kita memandang bahwa produk hukum itu kurang terang memberikan definisi tentang konsep dan sistem pendidikan nasional (Rifa'i, 2011). Mohammad Yamin adalah menteri pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, pada masa itu memberikan penerangan posisi pendidikan sebagai landasan pembangunan masyarakat Indonesia secara nasional, artinya pendidikan harus mengangkat tata nilai sosial yang menjadi identitas bangsa dengan corak budaya, tradisi, bahasa, agama, ras, dan sukunya yang beragam untuk menggantikan sistem pendidikan warisan kolonial.

Secara garis besar, pendidikan nasional adalah bentuk reaksi atas sistem pendidikan yang bersifat deskriptif dan elitis. Oleh karenanya tujuan pendidikan nasional adalah membentuk masyarakat yang demokratis (Rifa'i, 2011). Pada zaman kemerdekaan kondisi sosial politik sangatlah tidak stabil, oleh karenanya sangat berpengaruh terhadap pola dan dinamika pendidikan nasional saat itu, yaitu terjadi beberapa kali perubahan arah dan orientasi pendidikan nasional, misalnya pada masa permulaan kemerdekaan. Melalui Keputusan Menteri Pendidikan, tahun 1946, tujuan pendidikan berorientasi pada usaha menanamkan jiwa patriotisme dan lebih jauh dimaksudkan untuk menghasilkan patriot-patriot bangsa yang rela berkorban untuk bangsa dan negaranya (Rifa'i, 2011).

Secara umum, pendidikan di Indonesia terus mengalami transformasi yang panjang untuk sampai pada titik saat ini. Guna memenuhi standar mutu yang baik dari waktu ke waktu, perubahan yang mendasar pun terus dilakukan. Dalam sejarahnya, sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan di Indonesia kerap mengalami perubahan, mulai dari tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 hingga 2013. Hal ini tidak lepas dari konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara (Machali, 2014). Di mulai sejak tahun 1947, Bahasa kurikulum dikenal dengan nama Rencana pembelajaran 1947 dengan menggunakan istilah Leer Plan. Dalam Bahasa Belanda diartikan rencana pelajaran, lebih populer dibanding istilah kurikulum dalam Bahasa Inggris. Pada masa itu, kurikulum yang digunakan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Karakteristik Kurikulum Pada Zaman Reformasi

Pada tahun 1952 kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami penyempurnaan. Dengan berganti nama menjadi Rentjana Pelajaran Terurai 1952. Ciri dalam kurikulum ini adalah setiap pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Transformasi kurikulum pendidikan di Indonesia semakin berkembang dengan perubahan yang terjadi di tahun 1964

yang dilakukan penambahan seperti Matematika. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan (Alhamuddin, 2014).

BAB 8

TANTANGAN PENDIDIKAN INDONESIA PADA ERA DIGITAL

Problematika Transformasi Pendidikan Menuju Era 5.0

Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang terkena dampak pandemi, sehingga proses pembelajaran pendidikan di Indonesia yang semula konvensional (tatap muka di kelas) harus bertransformasi menjadi pembelajaran daring atau online yang dapat dilakukan tanpa terbatas tempat dan waktu. Pandemi merupakan proses percepatan transisi revolusi industri 4.0 menuju era 5.0. peradaban baru berbasis inovasi teknologi yang diperkenalkan Jepang tahun 2019 silam, perlu diakui memberikan dampak besar bagi sektor pendidikan di Indonesia.

Potensi pembelajaran berbasis teknologi sangat besar, dengan bantuan teknologi maka dapat mengatur pendidikan dengan cara yang hampir tidak terbayangkan sebelumnya bahwa teknologi memberi kemanfaatan seperti efektivitas biaya, jangkauan yang lebih baik, skalabilitas, fleksibilitas. Kecerdasan buatan, robotika, otomatisasi, Big Data, dan perkembangan teknologi lainnya pada dasarnya dan segera membentuk kembali pendidikan modern, ketika COVID-19 melanda dunia dan memaksa institusi pendidikan untuk terjun ke digitalisasi penuh. Transformasi yang cepat ini telah terjadi dengan berbagai keberhasilan, dengan semua implikasi yang sesuai untuk kualitas dan kinerja peserta didik, apalagi motivasi mereka, dan kesejahteraan fisik dan emosional. Era 5.0 merupakan proses

kolaborasi antara manusia sebagai pusatnya (*human-centered*) dan teknologi sebagai dasarnya (*technology based*).

Artinya Pendidikan era 5.0 adalah proses pendidikan yang menitik beratkan pada pembangunan manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal, pengetahuan dan etika dengan ditopang oleh perkembangan teknologi modern saat ini. Berbicara tentang realita pendidikan kita adalah berbicara tentang problem dan solusinya. Problem pendidikan kita tentu meliputi banyak hal, dari ketersediaan guru yang memadai, kompetensi guru, sarana dan prasarana pendukung serta keterlibatan orang tua dalam mendukung proses pendidikan anaknya. Solusi dari pemerintah atas problematika tersebut sudah dapat kita rasakan. Namun pandemi ini membuat pendidikan mengalami satu problematika besar yang harus diselesaikan secara kolaborasi antara guru, siswa, dan juga orang tua. Problematika besar itu adalah transformasi pendidikan era 4.0 menuju era 5.0. Tentu kita akan tergopoh-gopoh menghadapi era ini, dimana kita masih beradaptasi pada era 4.0. Kerja keras menyambut era 5.0 tampaknya telah dilakukan oleh pemerintah dengan menyiapkan konsep merdeka belajar, guru penggerak dan sekolah penggerak sebagai jawaban atas datangnya era 5.0.

Merdeka belajar yang digaungkan pemerintah adalah upaya perubahan *teacher sentries mindset* menjadi kolaborasi sentris. Artinya Tidak selalu guru menjadi sumber informasi, tetapi siswa dapat pula melengkapi apa yang disampaikan guru melalui sumber belajar lain yang dimilikinya. Sehingga Guru dan siswa akan bersama-sama menjadi *problem solver* dalam proses pendidikan.

Hadirnya era 5.0 yang merupakan penyempurnaan era 4.0 adalah problem besar sekaligus kesempatan besar wajah pendidikan kita. Guru yang menjadi penggerak dalam pendidikan era 5.0 harus mempunyai kompetensi memadai. Dia harus cakap dalam memberikan materi pelajaran serta mampu menggerakkan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Selain persiapan kurikulum dan sarana yang memadai terhadap pendidikan era 5.0, guru diharapkan mampu memastikan kurikulum berjalan secara optimal, oleh sebab itu, guru harus memiliki beberapa kompetensi utama dan pendukung seperti *educational competence, competence for technological*

menyelesaikan tugas belajarnya dengan lebih baik. Dengan strategi pembelajaran yang tepat, memungkinkan penyajian materi pelajaran lebih luas. Hal ini karena adanya *link and mach* antar guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik, sehingga dengan ketepatan pola yang dikembangkan potensi siswa sebagai peserta didik dapat melesat bahkan dapat menembus ruang pengetahuan yang langka.

Dengan keleluasaan model pembelajaran yang dikembangkan oleh guru kepada siswanya akan dapat membantu peserta didik memperoleh informasi keilmuan tanpa mesti mendatang lokasi yang dipelajarinya secara langsung. Sekali lagi model pengajaran dan pembelajaran memiliki fokus dan lokus yang berbeda, sehingga penting bagi guru sebagai pendidik untuk mengambil peran dan memanfaatkannya dengan cermat (Afif,2019). Namun demikian, kemajuan teknologi tersebut seharusnya diimbangi dengan penguatan pada sektor lain, sehingga kemudahan yang dihasilkan akibat kemajuan teknologi tidak menggerus potensi siswa yang dikembangkan dengan pendekatan konvensional. Misalnya saja, peserta didik masih perlu dilatih untuk tidak bergantung sepenuhnya pada informasi yang digali sendiri melalui kemudahan digitalisasi. Seorang pendidik perlu memberikan penugasan yang membutuhkan interaksi antar siswa, dilatih menggunakan alat belajar secara manual, serta dilatih untuk mengenal pemikiran yang berkembang di masyarakat sekitar. Penugasan-penugasan ini bukan untuk menghambat siswa dalam belajar, akan tetapi hal ini dimaksudkan sebagai penyeimbang agar siswa memiliki sikap teliti, sabar dan memiliki daya juang yang baik.

BAB 9

PENDIDIKAN INDONESIA DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Apa itu Pembangunan Berkelanjutan?

TLSF berpendapat bahwa 'salah satu hal yang paling penting untuk masa depan bersama adalah kesadaran bahwa masalah lingkungan dan pembangunan terkait erat dan oleh karena itu mengkhawatirkan lingkungan atau pembangunan itu sendiri adalah tidak pantas.'⁵ Komisi Dunia menyimpulkan bahwa: Lingkungan dan pembangunan bukanlah tantangan yang terpisah. Pembangunan tidak dapat hidup dengan basis sumber daya lingkungan yang memburuk; lingkungan tidak dapat dilindungi ketika pertumbuhan tidak memperhitungkan biaya kerusakan lingkungan. Masalah-masalah ini tidak dapat ditangani secara terpisah oleh institusi dan kebijakan yang terfragmentasi. Mereka terhubung dalam sistem sebab dan akibat yang kompleks. Oleh karena itu WCED berpendapat bahwa pendekatan pembangunan harus mempertimbangkan hubungan antara masalah ekologi, ekonomi, sosial dan teknologi. WCED menyebut 'pembangunan berkelanjutan', didefinisikan sebagai: pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Tujuan akhir dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua anggota komunitas, tentu

berasal dari keluarga miskin dan tak mampu. Kartu tersebut disediakan tidak dalam bentuk tunai untuk menghindari penyelewengan dana pendidikan oleh orang tua siswa.

Pemerintah Indonesia juga menyediakan Kartu Indonesia Pintar untuk membiayai operasional pendidikan bagi anak-anak terutama yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu di daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Ketersediaan kartu-kartu yang sejenis sangat membantu anak-anak dari kaum miskin mendapatkan kesempatan yang sama untuk pendidikan JDP Volume 10, Nomor 2, Juli 2017/169-195 Simanjuntak, Pendidikan untuk pembangunan 185 dengan kualitas yang baik sehingga masa depannya menjadi lebih baik dengan tingkat kesejahteraan dan ekonomi yang meningkat. Selain itu, tingkat kesejahteraan guru dan tenaga pendidik khususnya di daerah 3T harus menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah melalui pengalokasian dana untuk honor dan tunjangan terkait kesejahteraan yang dapat mendorong peningkatan kualitas belajar dan mengajar. Mustahil terjadi peningkatan kualitas pendidikan jika guru dan tenaga pendidik yang terlibat tidak mampu mengakses kesejahteraan yang memposisikan si guru dan tenaga pendidik berada dalam keadaan hidup yang layak.

Di lain pihak, daerah-daerah dengan kewenangan otonominya harus semakin giat berkompetisi menyediakan pendidikan dengan kualitas terbaik bagi pembangunan masyarakatnya untuk mendukung percepatan pembangunan fisik dan ekonomi di daerah sehingga menarik banyak putra-putri daerah untuk kembali membangun di daerahnya masing-masing. Keberhasilan pendidikan untuk membangun manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan berkelanjutan akan semakin nyata terwujud jika tidak terjadi korupsi di semua lini, oleh karena itu, perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa semua pihak yang terlibat dalam lembaga terkait pendidikan bebas korupsi dan berintegritas tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- , Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara, Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985.
- Abdullah, T. (2011). Indonesia dalam Arus Sejarah. Jakarta: Ichtiar Baru Van Haove.
- Abdurrahman, Ootong, Drs, PMII (1960-1985); Untukmu Satu Tanah Airku, Untukmu Satu Keyakinanku, Jakarta: PB PMII, 2005
- Adam, Asvi Warman, Pelurusan Sejarah Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007.
- Adityawan S., Arif, Propaganda Pemimpin Politik Indonesia: Mengupas Semiotika Orde Baru Soeharto, Jakarta: LP3ES, 2008
- Afian dan Mukmin, Hidayat, Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia Serta Peranannya dalam Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Jakarta: CV. Rajawali, 1985
- Afif.(2019). Pengajaran dan Pembelajaran di Era Digital. IQ (Ilmu Al-qur'an): Jurnal Pendidikan Islam Volume 2 No. 01 2019, p. 117-129 ISSN: 2338-4131 (Print) 2715-4793 (Online)DOI: <https://doi.org/10.37542/iq.v2i01.28>
- Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya, 9(2), 157-171.
- Agger, Ben, Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya: Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogya, 2003
- Ahmadi. (1987). Pendidikan dari Masa Ke Masa. Bandung: CV. Armico.
- Gunawan, Ary H. (1995). Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.
- Alam, Wawan Tunggal, Demi Bangsaaku: Pertentangan Soekarno Vs Hatta, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Alfas, Fauzan, PMII Dalam Simpul-Simpul Sejarah, Jakarta: PB PMII, 2004
- Alfian dan Sjamsuddin, Nazaruddin, ed., Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia, Jakarta; AIPI, 1988.

- Alfian dan Sjamsuddin, Nazaruddin, Profil Budaya Politik Indonesia, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1991.
- Alfian, Alfian, Mahalnya Harga Demokrasi: Catatan atas Dinamika Transisi Politik Indonesia Pasca Orde Baru, Naik dan Jatuhnya Abdurrahman Wahid, Jakarta: Intrans, 2001.
- Alhamuddin. (2014). SEJARAH KURIKULUM DI INDONESIA (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum). Nur El-Islam, 1.
- Ali, Fachry, Golongan Agama dan Etika Kekuasaan: Keharusan Demokratisasi dalam Islam Indonesia, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Ali, M. (2007). Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian IV: Pendidikan Lintas Bidang. IMTIMA. Djumhur, I. (1974). Sejarah Pendidikan. CV Ilmu.
- Altbach, Philip G., Politik dan Mahasiswa: Perspektif dan Kecenderungan Masa Kini, Jakarta: PT. Gramedia, 1988.
- Anjelina, Winda., Silvia, Nova., & Gitituati, Nurhizrah. (2021). Program Merdeka Belajar, Gebrakan Baru Kebijakan Pendidikan. Jurnal Pendidikan Tambusai. Halaman 1977-1982 ISSN: 2614-3097(online) Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021.
- Anwar, H. Rosihan, Soekarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan sebelum Prahalara Politik 1961-1965, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Astutia, Waluyab, Asikin. (2019). Strategi Pembelajaran dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0. Prosiding Universitas Semarang. ISSN (2686-6404).
- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran, 4(1), 195–205.
- Boone, A. Th (1996) Onderwijs en opvoeding in de Nederlandse Kolonin Pedagogisch Tijdschrift. (21), Nr.2.
- Brugmans, I.J, dan Baudet, H. Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan. Jakarta: Buku Obor, 1987.

- Brugmans, I.J. Politik Pengajaran. Dalam I.J, Brugmans, dan Baudet, H. Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan. Jakarta: Buku Obor, 1987.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. E. (2004). Adolescent Brain Development: A Period of Vulnerabilities and Opportunities. *Ann. N.Y. Acad. Sci.* Volume No. 1021. Pg: 1 - 22.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pendidikan di Indonesia 1900-1974, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Depdiknas. (2009). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia
- Dewey, J. (1963). *Freedom and Culture*. USA: Capricorn Books Edition Kemendikbud. (2019). "Merdeka Belajar: Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar". Jakarta:
- Djumransjah. (2002). *Filsafat Pendidikan*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing
- Emmanuel, Sujatmoko. Hak warga negara dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010.
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966).
- Giroux, H. (1992) *Border Crossing: Cultural Workers and the Politics of Education*, London: Routledg
- Hamalik, Omar. *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Hartono, Yudi. (2017). Pendidikan Nasional dan Kualitas Manusia Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 7, 84-102.
- Helius Sjamsuddin. (2017). *Sejarah Pendidikan Baru: Cakupan dan Prospek*. [Http://Sejarah.Upi.Edu/](http://Sejarah.Upi.Edu/). SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (2003).

- Helius, Sjamsudin. 2012. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Ikhsan, Fuad. *Dasar-Dasar Kependidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Imadudin, Iim. (2015). Pendidikan Kolonial dan Politik Asosiasi: Kajian Atas Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat (1877-1943). dalam *Patanjala*. Vol. 7 No. 3 September 2015: 543-558.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (Jakarta : Sekretariat Negara)
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan*. (Jakarta: Sekretariat Negara).
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Sekretariat Negara).
- Ismail. (2016). Politik Pendidikan Islam Orde Lama 1945-1965 (Study Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam). *Kabilah: Journal of Social Community*, 1, 139-169.
- Jailani, M. S., & Muhammad, M. (2019). Kilas Balik Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia pada Masa Orde Baru (1967-1997). *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies*, 19(1), 15-26.
- Karsiwan. Pembangunan Irigasi sebagai Kebijakan Etis Pemerintah Koloial Belanda di Pringsewu Lampung Tahun 1927. *Jurnal Pesagi* Vol 1, No. 3 Tahun 2013.
- Kochhar, S. (2008). *Pembelajaran Sejarah*. Grasindo.
- Kurniawati. (2015). Kurikulum Pendidikan Sejarah di Malaysia: Sebagai Bahan Refleksi Pengembangan Kurikulum Sejarah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(1), 54-69.
- Lemos, M. C. and A. Agrawal. (2006). *Environmental Governance*. *Annu. Rev. Environ. Resour.* Volume No. 31. Pg: 297 - 325.
- Lomborg, B. (2002). *The Skeptical Environmentalist: Measuring*

- the Real State of The World. Cambridge University Press. ISBN 978- 0-521-01068-9.
- Leo Agung and T. Suparman. (2012). Sejarah Pendidikan. Penerbit Ombak.
- Lubis, A. (2013). Pelaksanaan Standar Nasional dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan*, 1–17.
- Machali, I. (2014). Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045. III, 71–94. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.31.71-94>
- Madja, El Muhtaj. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Mahat, H. and S. Idrus. (2016). Education For Sustainable Development In Malaysia: A Study Of Teacher And Student Awareness. *Malaysia Journal of Society and Space* Volume No. 12 Issue (6). Pg: 77 – 88.
- Maksum. (1999). *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Moestoko,
- Malla, H. A. B. (2011). Kajian Sosio Historis Tentang Politik Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Inspirasi*, 1(14).
- Marlina, M. (2016). Pengaruh Zeitgeist Terhadap Muatan Sejarah di Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Kurikulum 1975-2004. *Indonesian Journal of History Education*, 4(1).
- Marshall, G. R., D. W. Hine, and M. J. East. (2017). Can community-based governance strengthen citizenship in support of
- Marzali, A. 2016. Menulis Kajian Literatur. *Jurnal Etnosia*, 01 02, 27-36.
- Nazmi, Didi. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya.
- Noe. Kebijakan Pemerintah Menuju Pendidikan Gratis Tepat Janji di Tengah Impitan Utang, *Jawa Pos*, Kamis, 21 Juli 2005.
- Maunah, Binti. *Landasan Pendidikan*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2022).
- Mudzakkir. (2015). Pendidikan Islam Masa Orde Lama Dan Orde Baru. *Al Fatih*, 4, 55-66. Rifa'i,
- Muhammad. (2016). *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Muhardi, "Kontribusi Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia", *Mimbar*. Vol. XX, No.4, Oktober-Desember 2004.
- Nasution, S. Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Nizar, R. d. (2009). Filsafat Pendidikan: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya. Jakarta: Kalam Mulia.
- Nizar, S. (2011). Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta. Prenada Media Group.
- Rifa'i, M. (2011). Sejarah Pendidikan Nasional dari Masa Klasik hingga Modern. Arr-Ruz Media
- Nurhusna Afandi, Alifia dkk. Pendidikan Pada Masa Pemerintah Kolonial di Hindia Belanda Tahun 1900-1930. *Jurnal Artefak* Vol. 7 No. 1 April 2020.
- Rangga, 2011. Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Baru 1968-1999.
<http://ranggambojoarea.blogspot.com/2011/06/sistem-pendidikan-indonesia-padamasa.html>
- Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. (Jakarta: Kencana, 2007).
- Sarnoto, Ahmad Zain. (2012) Konsepsi Politik Pendidikan Di Indonesia. *Educhild*, 01, 30-40.
- Sedana Arta, Ketut. (2015). Sejarah Pendidikan. Yogyakarta: Media Akademi.
- Sjamsudin, Helius, dkk. (1993). Sejarah pendidikan di Indonesia: Zaman Kemerdekaan, 1945-1966. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Somarsono. (1986). Pendidikan Indonesia Dari Zaman Ke Zaman. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.
- Sukmadinata. 2007. Metode penelitian Pendidikan. Bandung: Rosdakarya.
- Supriadi, Dedi, (Ed) (2003) Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi, Jakarta: Depdikbud.

- Susanto, Zuhdi, dkk. 2018. *Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Buku Sekolah Elektronik.
- Syahrudin dan Susanto, Heri. 2019. *Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nusantara Sampai Reformasi)*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Theresia Faradila Rafael Nong. 2013. *Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan ICESCR*. Makassar: Universitas Ushuluddin.
- Tilaar. (1995). *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- Tim UNY. (Tanpa Tahun). *Peta Jalan Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tomasevski, Katarina. 2001. *Human Right Obligation*. Buenos Aires.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN No. 78, TLN 4301
- UNESCO. 2010a. *Teaching and Learning for a Sustainable Future: a multimedia teacher education programme*. Paris, UNESCO. Available at: <http://www.unesco.org/education/tlsf/> (Accessed 7 January 2024)
- UNESCO. 2010b. *Education for Sustainable Development Lens: A Policy and Practice Review Tool*. Paris, UNESCO. Available at: <http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001908/190898e.pdf> (Accessed 7 January 2024)
- UNESCO. 2014. *Shaping the Future We Want: UN Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014) Final Report*. Paris,
- UNESCO. 2016. *Global Education Monitoring Report Summary 2016: Education for People and Planet: Creating Sustainable Futures for All*. Paris,

- UNESCO. Available at: <http://gem-report-2016.unesco.org/en/chapter/target-4-7-sustainable-development-and-global-citizenship/> (Accessed 7 January 2024)
- UNESCO. Available at: <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002303/230302e.pdf> (Accessed 7 January 2024)
- UNESCO. n.d.a. Sustainable Development. Available at: <https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-isesd/sd> (Accessed 7 January 2024))
- Wartoyo, Franciscus Xaverius, "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional", *Jurnal Hukum*. Vol. 05, No. 01, Januari-April 2016.
- Watson,, G. (1975) "Duts Educational Policy in Indonesia", 1850-1900", dalam *Asia Profile*. Vol. 3 (1).
- Yamin, Moh. (2009). *Menggugat Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Yuningsih, H. (2015). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru. *TARBIYA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1(1), 175-194.
- Yusuf, M. (2018). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Palopo: Lembaga Penerbit IAIN Palopo.
- Zed, Mestika. "Engku Mohammad Sjafe'i dan INS Kayutanam: Jejak Pemikiran Pendidikannya", dalam *TINGKAP* Vol. VIII No. 2 Th. 2012, hlm. 173-188, 2012.
- Zulkarnain. (2017). Filosofis Kurikulum Mata Pelajaran Sejarah Masa Orde Lama. *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 1, 57-62.

PROFIL PENULIS



Usman, S.Ag., M.Pd.

Lahir di Janarata Pondok Baru Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah Panggilan sehari-hari Usman dan merupakan anak ke 2 (dua) dari 6 (enam) bersaudara pasangan dari alm. Ayah H.Zainal Abidin dan Hj. Fatimah. Menyelesaikan Pendidikan Dasar di Sekolah Dasar Negeri 1 Redelong Tamat tahun 1989, kemudian melanjutkan pendidikan setingkat SLTP / MTs di Pesantren Darul Arafah lulus tahun 1993, kemudian melanjutkan ke tingkat Menengah Atas / Madrasah Aliyah pada Madrasah Ulumul Quran Langsa tamat tahun 1996. Melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri Medan tahun 1996 diselesaikan pada tahun 2001, sebagai mahasiswa aktif pada beberapa organisasi HMI dan Himmah.

Pada Tahun 2009 melanjutkan pendidikan Pascasarjana pada Universitas Medan Area jurusan Administrasi Publik tamat Tahun 2011, kemudian tercatat sebagai Mahasiswa IAIN Takengon tahun 2020 sebagai Mahasiswa Pasca Sarjana jurusan Pendidikan Islam dan tamat tahun 2022. Dalam perjalanan karier tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara pada tahun 2006 mengabdikan sebagai Guru SMA Negeri 1 Rikit Gaib, pada Tahun 2012 diangkat Sebagai Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues, Tahun 2017 diangkat Sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF, Tahun 2021 diangkat sebagai Kepala Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dayah pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Gayo Lues, Sekarang Sebagai ASN Pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana. Pada Tahun 2023 melanjutkan Pendidikan S3 Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (sedang Kuliah).



Farid Fauzi, M.Pd.

Jenjang pendidikan penulis berawal dari Sekolah Menengah Umum di SMUN Cimanggis Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Jurusan IPS dan berhasil lulus pada tahun 1999. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan studi Strata satu pada Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2004 penulis menyelesaikan studi strata dua pada Prodi Manajemen Pendidikan PPS Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2010. Penulis mempunyai karier sebagai abdi Negara pada salah satu PTKIN (Perguruan Tinggi Keislaman Negeri) yang telah menghasilkan beberapa artikel ilmiah pada jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi pada bidang sumber daya manusia pada lembaga pendidikan, sistem informasi manajemen pada lembaga pendidikan dan manajemen mutu pendidikan.



Rejeki Lensa, S.Ag., M.Pd.

Penulis lahir di Aceh Tengah Kecamatan Kota Takengon pada tanggal 3 Juni 1977. Anak ke 2 dari 5 bersaudara putra dari Alm. Tgk. Syafaruddin (Aman Dawi) dan Lina (Inen Dawi). Penulis menyelesaikan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Takengon (MIN II Takengon) tahun 1990 di Kampung Asir-Asir melanjutkan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah Negeri I Takengon (MTsN I Takengon) tahun 1993 di Kampung Boom dan jenjang Madrasah Aliyah Negeri I Takengon (MAN I Takengon) tahun 1996, sedangkan Strata satu (S1) pada Fakultas Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh sekarang UIN Ar-raniry tahun 2001 dan menyelesaikan Strata dua (S2) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Takengon Tahun 2019. Menikah dengan Kasmaryani, S. Hut dengan mempunyai 4 orang anak,

yaitu: Mutia Rika, Humaira Rika, Alfian Purnama Rejeki dan Al Fatih Rahmat Rejeki.

Adapun karier penulis setelah menyelesaikan studi strata satu (S1). Sebagai guru tidak tetap (GTT) di MAN I Aceh Tengah tahun 2002-2003, tenaga pengajar di SMU Swasta 1001 tahun 2002-2003, Dosen dan Tenaga Struktural pada era STAI Gajah Putih Takengon sampai dengan penegerian menjadi STAIN Gajah Putih Takengon dari tahun 2002 - 2013, pada tahun 2005 sebagai tenaga Kontrak honorer daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dengan jabatan Ketua Wilayahul Hisbah di Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah, pada tahun 2008 Wilayahul Hisbah berpisah dengan Dinas Syari'at Islam yang kemudian bergabung dengan Satpol PP, selanjutnya pada tahun 2010 diangkat menjadi PNS pada Kantor Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya pada tahun 2013 pindah status PNS Pemda Aceh Tengah menjadi PNS Kementerian Agama Republik Indonesia pada STAIN Gajah Putih Takengon. Adapun karier pada STAIN Gajah Putih Takengon - IAIN Takengon pernah menjabat Bendahara Pengeluaran, Kasubbag. Akademik, Plt. Kepala Biro IAIN Takengon dan Kasubbag. TU. Fakultas Syariah Dakwah dan Ushuluddin IAIN Takengon sampai dengan sekarang.



Emy Yusdiana, M.Ed.

Penulis lahir di Aceh Tengah pada tanggal 30 September 1983. Menyelesaikan pendidikan dasar di MIN 1 Bebesen pada tahun 1995, kemudian menyelesaikan pendidikan tingkat pertama di SMPN 1 Takengon pada tahun 1998, dan melanjutkan ke jenjang pendidikan SLTA di SMUN 8 Takengon dan selesai pada tahun 2001. Lulus dari jenjang tersebut kemudian melanjutkan ke jurusan Tarbiyah pada Prodi Bahasa Inggris STAI takengon (2007), lalu memperoleh pendidikan Magister di UPSI (Universitas Pendidikan Sultan Idris) Malaysia pada tahun 2010 dengan mengambil program studi Pengurusan Pendidikan

(Manajemen Pendidikan). penulis mengabdikan sebagai dosen pada Fakultas Manajemen pendidikan Islam sejak Tahun 2015 di kampus Institut Agama Islam Negeri Takengon Aceh Tengah.

Pengalaman kerja diawali dari tahun 2015, selain sebagai dosen, penulis juga pernah menjabat sebagai kepala Laboratorium *Micro Teaching* di STAIN Gajah Putih (2014) dan sekarang menjabat sebagai kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) tepatnya di tahun 2023-2024. "menulislah, karena tanpa menulis engkau akan hilang dari pusaran sejarah". Inilah sebagai motivasi penulis hingga bisa melahirkan beberapa karya tulisan diantaranya: Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagai Penjamin Kualitas (2010), Ikhtisar Manajemen Pendidikan (2016), "Manajemen Organisasi dan Pengorganisasian dalam Perspektif Sistem" (2018), "Model-model Berpikir Sistem dalam Islam" (2019), "Menguak Peran Ulama di Gayo Analisis Sosial dan Historis" (2021), *Scaffolding EARGD: On Effective Teaching Writing for EFL* (2021), *Development Strategy for Islamic Boarding School / Dayah Maqamam Mahmuda Takengon* (2022). Selain dari karya-karya di atas beberapa karya suntingan lain serta tulisan dalam bentuk jurnal.



Aini Safitri, S.Pd.I., M.Pd.

Penulis lahir di Aceh Tamiang Kecamatan Rantau pada tanggal 01 Juni 1987. Anak bungsu dari 4 bersaudara, putri dari ayahanda Kasim dan Ibunda Sadiyahem. Pendidikan S-1 tahun 2009-2013 di STAI Aceh Tamiang pada Jurusan Tarbiyah dan Keguruan prodi Pendidikan Agama Islam dengan lulusan terbaik. Strata 2 (S.2) di Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2016-2018 Prodi Pendidikan Islam: Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam dengan predikat Terpuji urutan 3 terbaik.

Mengawali karier sejak tahun 2008 sebagai guru PAUD/TK Tunas Bangsa Dusun V Air Putih Desa Salahaji Kec. Pematang Jaya Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Kepala PAUD/TK Tunas Bangsa tahun 2008-

2009. Mengajar sebagai guru mengaji di TPQ AL-HUDA Desa Ingin Jaya Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang 2008-2009. Dewan Pembina TPQ AL-HUDA tahun 2008 s.d sekarang, dan menghibahkan tanah milik pribadi kepada pengurus TPQ sebagai sumbangsih bagi sarana pendidikan Agama tahun. Tata Usaha di SMP Negeri 5 Rantau sampai tahun 2009-2016. Guru Pendidikan Agama Islam tahun 2016-2019 di SMP Negeri 4 Kejuruan Muda. Berikutnya tahun 2019-2020 mengajar sebagai guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 Kejuruan Muda. Mengawali karier dosen pada almamater penulis STAI Aceh tamiang tahun 2019-2020. Dosen PNS pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Jurusan Tarbiyah dan Keguruan Prodi Manajemen Pendidikan Islam tahun 2020 s. d sekarang. Sekretaris prodi Manajemen Pendidikan Islam masa kerja 2023-2027. Saat ini sedang menempuh pendidikan S3 program studi Manajemen Pendidikan Islam di UIN Sumatera Utara Medan dimulai Agustus tahun 2023.

Nusraini, M.Ed.



Penulis lahir Simpang Tiga, 11 juli 1977, saat ini penulis Mengajar di Yayasan Arziqi Zumara Takengon (SIT Az Zahra Takengon). Lahir di Simpang Tiga Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Putri dari pasangan Selamat. K dan Syamsuraini ini merupakan anak pertama dari 4 (empat) bersaudara. Menempuh Pendidikan Dasar di Sekolah Dasar Negeri 2 Simpang Tiga Redelong dan tamat pada tahun 1990, kemudian melanjutkan pendidikan setingkat SLTP di SLTP N 1 Simpang Tiga Redelong dan lulus pada tahun 1993. Selanjutnya melanjutkan ke tingkat Menengah Atas pada Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Banda Aceh, lulus pada tahun 1996.

Tahun 1997 melanjutkan pendidikan jenjang Diploma II pada jurusan Pendidikan Guru Taman kanak-kanak (PGTK) di Universitas Negeri Medan dan selesai pada tahun 2000. Jenjang Strata I pada Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini lulus pada tahun 2010 pada Universitas Terbuka. Selanjutnya meneruskan

pendidikan tingkat Magister jurusan Pendidikan Awal Kanak-kanak di Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia dan lulus pada tahun 2018. Mulai bekerja sebagai guru pada TKIT Al Azhar Banda Aceh pada tahun 2001, kemudian menjabat sebagai Kepala Sekolah dan diangkat sebagai ASN dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2010. Tahun 2012 mendirikan Yayasan Arziqi Zumara dan membuka TKIT Az Zahra Takengon, selanjutnya tahun 2014 mendirikan SMPIT Az Zahra, Tahun 2018 SDIT Az Zahra dan Tahun 2023 mendirikan SMAIT Az Zahra Takengon. Berstatus ASN pada TKIT Az Zahra Takengon dan mengelola Yayasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penulis.



Nurmalina, M.Pd.

Penulis lahir di Aceh Besar provinsi Aceh, Penulis menyelesaikan sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2006. Kemudian menjadi tenaga pengajar pada salah satu sekolah di Aceh Besar. Dan pada tahun 2010 melanjutkan program Magister Administrasi Pendidikan di Universitas Syiah Kuala dan selesai pada tahun 2013. Dan sejak tahun 2014 penulis menjadi dosen tetap Manajemen Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Negeri Takengon Aceh Tengah. Penulis juga aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar nasional.



Rasidah, M.Pd.

Penulis lahir di Permata, 21 April 1979 Pengalaman Kerja penulis: Dosen STAIN Gajah Putih Takengon (2003-2005), Guru SMPN 10 Takengon (2006-2017), Pengawas PAI Tk. SMP/SMA Kab. Aceh Tengah (2017 s/d Sekarang), Asesor BAN-SM Provinsi Aceh (2021 s/d Sekarang), Asesor Guru Penggerak Tingkat Nasional (2021 s/d Sekarang), Asesor Kepala Sekolah Penggerak Tingkat Nasional

(2021 s/d Sekarang), Asesor Pengajar Praktik Tingkat Nasional (2023 s/d sekarang), Asesor fasilitator Sekolah Penggerak Tingkat Nasional (2021 s/d Sekarang), Asesor PPG Prajabatan Tingkat Nasional (2023 s/d Sekarang), Fasilitator Daerah PKB Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah (2022 s/d Sekarang) dan KORWASDA Kabupaten Aceh Tengah (2023 s/d Sekarang).



Wirda Novita, S.E., M.Pd.

Penulis lahir di Takengon 1983. Pendidikan yang ditempuh yaitu MIN 1 Kota Takengon tahun 1996, SMPN 1 Takengon Tahun 1999, SMU Negeri 1 Bebesen Tahun 2002, dan melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala selesai tahun 2007 . Tahun 2016 melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2) di IAIN Takengon, dan kemudian menjadi salah satu Tenaga Kependidikan (Kaur Keuangan) Tahun 2009-2012 di STAIN Malikussaleh Lhokseumawe. Bendahara tahun 2013-2016 pada STAIN Gajah Putih Takengon dan Kabag Umum dan Layanan Akademik di lingkungan IAIN Takengon sejak 2017 sampai sekarang. Kemudian kembali melanjutkan pendidikan tingginya pada Strata Tiga (S3) pada Program Doktorat Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Saat ini penulis sedang menulis karya ilmiah untuk memenuhi tugasnya sebagai seorang mahasiswi Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Medan.



Raudatussaadah, S.Pd.I., MA.

Penulis lahir di Medan 1988, dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang kental terhadap pendidikan. Ayahnya adalah seorang dosen yang juga Guru Besar di salah satu Perguruan Tinggi Islam Negeri, dan ibul adalah seorang pensiunan Pegawai Pemerintahan. Pendidikan yang ditempuh yaitu Sekolah Dasar Negeri 106161 di

Medan, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Medan, Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan, dan melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN SU) selesai tahun 2010. Tahun 2011 melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2) di IAIN SU Medan, dan kemudian menjadi salah satu dosen (tenaga pendidik) di lingkungan IAIN SU Medan sampai tahun 2021(sekarang berlomba menjadi UIN SU Medan), dan sekarang kembali melanjutkan pendidikan tingginya pada Strata Tiga (S3) pada Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Saat ini masih aktif sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Aceh Tengah dan sedang menulis karya ilmiah untuk memenuhi tugasnya sebagai seorang mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.



Farida Isnaini, S.T., M.M.

Jenjang Pendidikan penulis berawal dari SMU Negeri 1 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh jurusan IPA dan tahun kelulusan 1993. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Syiah Kuala dan berhasil menyelesaikan studi strata 1 pada pendidikan Teknik Kimia pada tahun 1999 dan penulis menyelesaikan studi strata 2 pada prodi Manajemen di Universitas Syiah Kuala pada tahun 2008. Penulis mempunyai karier sebagai abdi negara di Pemerintahan Daerah sejak tahun 2001 dan pindah ke Kementerian Agama sejak 2022 dan masih mengabdikan sebagai tenaga Administrasi Akademik di Biro Rektorat IAIN Takengon hingga saat ini.



Ifnaldi, S. Pd.I., M.Pd.

Lahir di Koto Baru , Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 31 Mei 1987, adalah seorang penulis dan akademisi Indonesia dalam bidang pendidikan. Setelah menamatkan pendidikan dasarnya di SD 07 Koto baru pada tahun 1999 dan melanjutkan pendidikan agama di PP Thawalib Tanjung Limau selesai tahun 2005.

Dengan semangat akademis yang tinggi, pada tahun 2005, Penulis memulai perjalanan pendidikan tinggi di UIN Mahmud Yunus Batusangkar, mengambil jurusan Kependidikan Islam Konsentrasi Bimbingan dan Konseling dan berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 2010. Tak berhenti di situ, pada tahun 2011, kembali melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Negeri Padang (UNP) dengan mengambil jurusan Bimbingan dan Konseling. Penulis pernah menjadi dosen STAI Imam Bonjol Padang Panjang, STIT Ahlussunnah Bukittinggi dan UIN Bukittinggi hingga tahun 2019 dan sekarang mengabdikan diri di IAIN Takengon sebagai Dosen Bimbingan Konseling Islam.

Kini, Penulis sedang meniti perjalanan akademis dengan menempuh studi doktoral di UIN Sumatera Utara, fokus pada bidang Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Melalui perjalanan hidupnya, penulis memberikan inspirasi sebagai sosok yang tidak hanya berkontribusi dalam dunia akademis, tetapi juga sebagai penulis dan pencerah bagi pendidikan Islam di Indonesia.



Irwansyah, S.Pd.I, M.Pd.

Pekerjaan penulis saat ini adalah seorang PNS, Tempat dan Tanggal Lahir Linge, 05 Juni 1984. Riwayat Pendidikan Penulis sebagai berikut: 1991 - 1997: SD Negeri Singah Mulo, 1997 - 2001: MTsN I Takengon, 2001 - 2004: MAN I Takengon, 2005-2007: Maroco (Rabat), Tunisia. 2007 - 2009: Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang 2010 - 2012: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Muhammad Jufni, S.Pd.I., M.Pd.

Lahir di Desa Pulo Lueng Teuga, Teupin Raya-Pidie, pada 1 juli 1986. Dia sering dipanggil Jufni dan dia anak ke-4 dari 7 bersaudara, Dia anak dari pasangan Umar Miah dan Mardiana Usman, Dia menyelesaikan pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas di daerah kelahirannya Pidie. Pada tahun 1998 ia resmi ditabalkan sebagai lulusan SDN 1 Teupin Raya, menyusul kemudian pada tahun 2001 ia berhasil merampungkan pendidikan tingkat Tsanawiyah di MTsN Glp. Minyeuk. Tiga tahun kemudian, ia menuntaskan perjalanan wajib belajar 12 tahunnya di MAN Beureunuen. Semasa di sekolah ia aktif di berbagai organisasi intra sekolah seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIM) maupun kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR), serta di OSIM MAN Beureunuen ia pernah menempati posisi sebagai Wakil Ketua satu.

Semasa kuliah, ia aktif mengikuti berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) baik internal kampus maupun eksternal kampus, seperti : Sanggar Seni Seulaweut, UKM-pramuka, BEMA, BEM-Fakultas, Himpunan Mahasiswa dan lain-lain. Setelah menyelesaikan study magisternya di tahun 2014 memantapkan hatinya untuk mengabdikan di kampus menjadi seorang pengajar, dan saat ini tercatat sebagai salah satu dosen tetap di Kampus Institut Agama Islam Al muslim-Aceh pada tahun 2018-2021 di amanahi menjabat sebagai ketua program studi syariah ahwal syakhshiyah di fakultas syariah dan ekonomi Islam Institut Agama Islam Almuslim Aceh, Sosok yang tinggi besar ini terkenal dengan suka bercanda. Dalam hal memimpin dia berprinsip profesional, ikuti aturan saja. Kalau bekerja sesuai aturan, pasti selamat, kepala tidak pusing, jelasnya. Tunjukkan saja prestasi pekerjaan kita, biarkan orang yang menilai. Tidak usah cari popularitas, tambahannya lagi.



Muhammad Yusuf, M.Pd.

Lahir di Desa Simpang Semadam Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara, pada 04 Mei 1981. Panggilan Sehari-hari Yusuf anak ke-3 dari 8 bersaudara, Dia anak dari pasangan Ramadan dan Jubaidah. Dia menyelesaikan pendidikan dasar hingga Sekolah Menengah atas di Daerah kelahirannya di Aceh Tenggara. Pada tahun 1994 ia resmi sebagai lulusan SDN Impres Simpang Semadam, kemudian pada Tahun 1997 ia berhasil Menamatkan pendidikan tingkat SMP di SLTPN 3 Lawe Sigala-Gala. Tiga tahun kemudian, ia juga menyelesaikan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahunnya di SMUN 1 Kutacane. Semasa di SMUN 1 Kutacane ia aktif di berbagai Organisasi Intra Sekolah seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) maupun kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR).

Semasa Kuliah DII PGMI STAIS Hikmatul Fadhilah Medan yang diselesaikan Tahun 2002 dan S1 PAI pada STAIS AL-IKHLAS DAIRI SIDIKALANG yang diselesaikan tahun 2006. ia aktif mengikuti berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) baik internal Kampus maupun Eksternal Kampus, seperti: Sanggar Seni Gayo, UKM-Pramuka, BEM- Fakultas, Himpunan Mahasiswa dan lain-lain

Pada 02 Oktober 2004 dinyatakan Lulus Tes, Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 2005 sebagai CPNS Formasi Umum Guru PAI dalam Lingkungan Departemen Agama Kabupaten Gayo Lues. Di Tahun 2006 Beliau Diangkat Sebagai Kepala Madrasah pada MTsS Ujung Baro Kabupaten Gayo Lues yang didirikan beliau bersama rekan-rekannya ketika itu. Selanjutnya Tahun 2019 ia menyelesaikan Studi Magisternya (S2 PAI) di IAIN Takengon Aceh Tengah pada saat yang sama beliau juga menjabat sebagai Kepala MTsN 1 Gayo Lues. Tahun 2021 setelah menjabat sebagai Kepala Madrasah baik Swasta maupun Negeri selama lebih kurang 16 Tahun di beberapa Madrasah, beliau diangkat sebagai Pengawas Sekolah dan Madrasah Tk. SMP/MTS, SMA/MA/SMK dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues, kemudian pada Tahun 2023 melanjutkan

Pendidikan S3 Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (sedang Kuliah).

Karya tulis Ilmiah yang sudah pernah di publish beliau adalah

1. Skripsi dengan judul "*Fasilitas Belajar dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Belajar Siswa di MAN Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*"
 2. Thesis dengan judul "*Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Siswa Sekolah Dasar Swasta Terpadu Raudlatul Jannah Yayasan Pelita Cendekia An-Najah Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*"
 3. Buku dengan 'judul *Implementasi Full Day School Pada MTsN 1 Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*"
 4. Buku dengan judul "*Peningkatan Kompetensi Pengawas Madrasah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues*"
-



Didi Sartika, M.Pd.I.

Lahir di Simeulue, Provinsi Aceh, pada tanggal 26 April 1985, adalah seorang penulis dan akademisi Indonesia dalam bidang pendidikan. Setelah menamatkan pendidikan dasarnya di SD Negeri Inor pada tahun 1997 dan SMP N 1 Sinabang pada tahun 2000, Penulis melanjutkan pendidikannya di MA Muhammadiyah, meraih kelulusan pada tahun 2003. Dengan semangat akademis yang tinggi, pada tahun 2005, Penulis memulai perjalanan pendidikan tinggi di UIN Bandung, mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), dan berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 2009. Tak berhenti di situ, pada tahun 2011, kembali melanjutkan studi pascasarjana di UIN Malang dengan mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Penulis pernah menjadi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Simeulue hingga tahun 2019 dan sekarang mengabdikan diri di IAIN Takengon sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.

Kini, Penulis sedang meniti perjalanan akademis dengan menempuh studi doktor di UIN Sumatera Utara, fokus pada bidang Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Melalui perjalanan hidupnya, penulis memberikan inspirasi sebagai sosok yang tidak hanya berkontribusi dalam dunia akademis, tetapi juga sebagai penulis dan pencerah bagi pendidikan Islam di Indonesia.

Email Penulis : didiputrasinabang@gmail.com



Windisyah Putra, M.Pd.I.

Lahir dari keluarga suku Gayo di Takengon pada tanggal 10 Oktober 1984. Dari sejak sekolah sampai perguruan tinggi penulis aktif dalam berbagai organisasi dan gerakan sosial. Jenjang pendidikan penulis berawal dari Sekolah Menengah Umum di SMUN 1 Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh Jurusan IPS. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan studi Strata satu pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris pada tahun 2007 penulis menyelesaikan studi strata dua pada Prodi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal PPS Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012. Pada tahun 2019 penulis diangkat menjadi dosen PNS di kampus IAIN Takengon. Selain kegiatan mengajar penulis juga sedang kuliah di program doktor UIN Sumatera Utara Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Penulis juga aktif menghasilkan beberapa buku dan artikel ilmiah pada jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi.

Email Penulis: windisyah84@gmail.com

HISTORIOGRAFI UNDANG - UNDANG PENDIDIKAN DI INDONESIA

Sejak Zaman Kolonial Hingga
Zaman Reformasi

Buku ini menjelajahi sejarah undang-undang pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga era reformasi, menyoroti perubahan signifikan dalam regulasi pendidikan sepanjang waktu. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana undang-undang pendidikan Indonesia mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya sepanjang sejarah dengan menggabungkan pendekatan historis dan analisis kebijakan. Buku ini juga melihat bagaimana tokoh pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya berperan dalam pembentukan undang-undang pendidikan di Indonesia. Tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara dan Mohammad Hatta memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak pendidikan setiap warga negara Indonesia. Buku ini menggabungkan pendekatan historis dan analisis kebijakan untuk memahami bagaimana undang-undang pendidikan mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat, serta berperan dalam pembangunan nasional. Selain itu, buku ini menggambarkan tantangan dan peluang dalam implementasi undang-undang pendidikan di lapangan, memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi pendidikan.